Catatan Untuk Pengetahuan MDF - JRF
Pelajaran dari Rekonstruksi Pasca Bencana di Indonesia

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF): Landasan bagi Rekonstruksi melalui Kemitraan yang Tepat

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF), yang dibentuk untuk mendukung rekonstruksi pasca-tsunami di Aceh dan Nias, secara umum dianggap sebagai salah satu program sejenis yang paling berhasil. Alasan utama keberhasilan ini adalah kepemimpinan Pemerintah Indonesia dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung agenda Pemerintah. Faktor dan perspektif lain ikut berperan dan semuanya meningkatkan keberhasilan kemitraan dalam membuahkan hasil yang luar biasa.

MDF dibentuk berlatar belakang Deklarasi Paris. Meskipun pelaksanaan prinsip-prinsip ketepatan pemberian bantuan Deklarasi Paris rasa memiliki, penyerasian, penyelarasan, hasil, dan pertanggungjawaban—bukan tujuan utama, pelaksanaan program MDF merupakan contoh implementasi Deklarasi Paris. Selama tujuh tahun pelaksanaan, MDF menyatukan berbagai mitra, yang terdiri dari semua tingkat pemerintahan, donor, lembaga mitra dan pelaksana, LSM, dan masyarakat. Para mitra ini bersama-sama membantu Aceh dan Nias melangkah kedepan dengan meninggalkan sengketa dan kerapuhan melalui rekonstruksi pascabencana untuk membangun landasan bagi pembangunan yang efektif.

Banyak Tantangan, Banyak Kebutuhan

Aceh dan Nias memiliki tantangan berlapis. Bencana meninggalkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik Aceh maupun Nias menghadapi persoalan tata kelola yang serius, dengan kemampuan warga lokal yang lemah dan terkotak-kotak. Di Aceh, bencana alam ini menambah penderitaan bagi provinsi yang dilanda perang saudara selama tiga puluh tahun. Di Nias, kesulitan dalam menghadapi kerapuhan alam diperberat oleh keterasingan dan pengabaian selama bertahun-tahun. Pemerintah daerah dan warganya yang patah semangat kurang memiliki keahlian untuk menangani rekonstruksi besar-besaran.

Kemitraan diantara pemangku kepentingan nasional dan internasional tersebut memerlukan mekanisme pembiayaan yang mampu menangani upaya pembangunan kembali dalam kompleksitas tersebut, dan MDF dibentuk untuk memenuhi kebutuhan terkait.

Dalam semangat bersama membantu rekonstruksi, motivasi pemangku kepentingan beragam, namun saling melengkapi. Bagi Pemerintah, kemampuan memimpin itu mutlak. Biasanya Pemerintah ingin menggunakan sistemnya sendiri dan menyatakan secara jelas pilihan apa yang perlu dibiayai serta perangkatnya yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Donor membutuhkan pertanggungjawaban dana, visibilitas untuk kontribusi mereka, dan hasil yang tepat. Mitra pembangunan lain, termasuk badan internasional dan organisasi masyarakat sipil, berupaya menyumbang berdasarkan keahlian komparatif masing-masing, untuk memantapkan pelaksanaan secara baik dan membina kemitraan yang erat guna membantu korban bencana. Bagi Bank Dunia selaku Wali, yang paling penting adalah memastikan hasil yang tepat dan pertanggungjawaban dana. Adapun pelaksana yang paling penting dalam kancah ini, yaitu masyarakat sendiri, perlu merasa manfaat dari perdamaian dan rekonstruksi akan menuai hasil, dan bahwa mereka merupakan bagian dari proses untuk menetapkan prioritas lokal. Meski tidak memiliki kendali atas bencana yang melanda, mereka perlu memiliki kendali atas pembangunan kembali masa depan mereka.

Box: Dana Perwalian Multi Donor (MDTF)

MDTF merupakan cara pembiayan yang mengumpulkan kontribusi dari berbagai donor dan memberikan ke sejumlah penerima dibawah pengawasan pengelola atau Wali. Dalam keadaan pascakonflik seperti perang atau bencana alam, model MDTF ini dapat diterapkan pada saat kelembagaan pemerintah lemah, dan memungkinkan dana tersalurkan dengan cepat dan terkoordinir.

Kerangka Kerja Strategis bagi Rekonstruksi

Kerangka kerja MDF didasarkan pada tiga strategi yang saling terkait, yaitu kemitraan yang erat, pelaksanaan secara tepat, dan aspek kualitatif lintas sektoral. Strategi ini dapat meningkatkan hasil program dari sekedar bagus menjadi luar biasa dalam memenuhi harapan korban bencana.

• Kemitraan bagi Rekonstruksi

Pemulihan yang Dipimpin oleh Pemerintah: Penggerak terpenting atas keberhasilan MDF adalah kepemimpinan Pemerintah Indonesia dalam pemulihan di Aceh dan Nias. Pemerintah Indonesia memegang tampuk pimpinan dalam melaksanakan dan menyelesaikan Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DALA) dalam waktu satu bulan sejak tsunami melanda. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibuat untuk memprioritaskan program-program pelaksanaan bersasaran. Badan khusus dengan kewenangan setingkat kementerian dibentuk, yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR), untuk mengkoordinasikan upaya rekonstruksi dan melaksanakan Rencana Induk. Pada bencana lain yang agak lebih kecil, yaitu gempa bumi di Jawa pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia mengandalkan sistem pemerintahan yang ada untuk mengelola dan mengkoordinasikan upaya rekonstruksi besar-besaran secara tepat. Pengalaman ini menunjukkan bagan organisasi tersebut perlu dirancang sesuai dengan sifat dan cakupan bencana, sepanjang kesungguhan niat dan kekuatan kepemimpinan Pemerintah dipertahankan.

Dukungan Mitra Pembangunan: Dengan kepemimpinan Pemerintah atas agenda restrukturisasi, mitra lain dapat menyerasikan dukungan mereka dalam satu kerangka kerja. MDF dibentuk untuk mendukung Rencana Induk Pemerintah Indonesia dan bekerja sejalan dengan instansi beserta prosedurnya. Lebih dari 70 persen dana MDF disalurkan melalui APBN.

MDF menggambarkan pelaksanaan yang berbeda bagi donor yang berbeda. Bagi donor yang tergolong agak kecil, bantuan MDF diberikan tanpa memerlukan operasionalisasi besar. Bagi donor lain, bantuan MDF adalah cara terbaik untuk mendukung pendekatan multilateral, serta sarana untuk memperkecil biaya transaksi dan memperbesar dampak dana bantuan, dengan jaminan diterapkannya standar tinggi dalam pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara finansial dan operasional. MDF menyediakan landasan tunggal bagi 15 donor untuk melakukan perencanaan, pendanaan, penyaluran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas semua kegiatan MDF.

Gabungan lembaga mitra dan lembaga pelaksana dalam MDF tersebut memperkecil perpecahan dan memberi kesempatan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing organisasi. Organisasi multilateral besar seperti UNDP, ILO, WFP, dan Bank Dunia berperan sebagai lembaga mitra. Lembaga pelaksana mencakup antara lain kementerian lembaga terkait dan LSM internasional. Lembaga mitra melakukan penilaian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi proyek yang dibiayai oleh MDF, dan mengurus hibah dari MDF untuk pembiayaannya, yang menerapkan landasan pertanggungjawaban secara hukum dan pengaturan tata kelola mereka sendiri. Sedangkan lembaga pelaksana membawa serta keunggulan masing-masing dalam hal kemampuan dan tata caranya. Pengaturan ini menghasilkan tanggapan bersisi banyak terhadap agenda Pemerintah dalam upaya pemulihan, sehingga memungkinkan kecepatan dan cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan yang dapat dicapai apabila tidak dengan cara tersebut.

Struktur Tata Kelola yang Inklusif dan Efektif: Keberhasilan MDF juga disebabkan oleh susunan tata kelola yang melibatkan semua pihak, dengan Komite Pengarah yang terdiri dari wakil dari BRR, Bappenas, Kementerian Keuangan, Pemerintah Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 15 donor MDF, serta wakil masyarakat madani Aceh dan Nias, dan lembaga pemantau seperti PBB dan masyarakat LSM internasional. Anggota Komite Pengarah memiliki hak bersuara, yang menetapkan kebijakan dan peruntukan dana, dan Kelompok Pengkaji Teknis membantu peran tersebut. MDF juga memelopori kepemimpinan bersama, yang mewakili Pemerintah Indonesia, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, Uni Eropa selaku wakil para donor, dan Bank Dunia sebagai Wali, untuk membantu penetapan keputusan secara efektif, bekerja untuk Komite Pengarah, dan pelaksanaan kegiatan MDF secara tepat. Pertemuan Komite Pengarah menjadi forum penting untuk membicarakan berbagai persoalan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Aceh dan Nias.

• Ketepatan Pelaksanaan Strategi

Tahapan Pelaksanaan untuk Memenuhi Harapan: Strategi yang paling berguna adalah pelaksanaan secara bertahap, yang membantu memenuhi harapan selama pelaksanaan rekonstruksi. Dalam setiap keadaan pascakrisis, ada ketegangan dalam menyeimbangkan kecepatan pelaksanaan, kualitas dan rasa memiliki oleh penerima manfaat rekonstruksi, dan keberlanjutan jangka panjang. Tujuan-tujuan ini saling bersaing, dan cara terbaik untuk memperkecil pelaksanaan agar tidak tumpang-tindih adalah dengan pelaksaan tiga tahap. Tahap pertama difokuskan pada kepentingan pemulihan dasar: tempat tinggal, prasarana kecil, jalur logistik, dan perhubungan. Tahap kedua berupa rekonstruksi besar prasarana dan lingkungan hidup, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tahap terakhir berpindah ke peletakan landasan bagi pembangunan ekonomi melalui pengembangan mata pencarian dan peningkatan kapasitas yang terarah.

Penggerak utama pemulihan dasar kecepatan untuk membantu pelaksanaan kebutuhan mendesak, dengan melibatkan masyarakat sehingga mereka menjadi bagian dari proses rekonstruksi. Langkah ini menambah kepuasan penerima manfaat, memperkuat kerukunan masyarakat, dan membantu proses penyembuhan trauma perorangan dan masyarakat. Fokus pada tahap rekonstruksi adalah pelaksanaan proyek dan pembiayaan, yang mengutamakan kualitas dan rasa kepemilikan, ketika proses pengadaan dan pengamanan sosial dan lingkungan rumit dan memerlukan waktu untuk melihat hasilnya. Hal ini terutama yang mencakup pembiayaan untuk prasarana besar. Dalam tahap terakhir berupa peralihan menuju pembangunan ekonomi, penggeraknya adalah keberlanjutan. Tahap ini membantu peralihan menuju pertumbuhan jangka panjang yang disertai peningkatan kemampuan, sehingga dampak rekonstruksi dan keberlanjutan dari investasi donor terus ada setelah berakhirnya program rekonstruksi.

Prinsip-prinsip Rancangan dan Pelaksanaan Proyek: Melalui pendekatan terbuka, MDF berperan sebagai

perangkat pengisi kekurangan yang luwes, dan memberi bantuan untuk bidang yang tidak ditangani oleh donor atau mitra lain. Pemilihan proyek juga dipacu dengan cepat dengan memperbesar cakupan yang ada sejauh memungkinkan. Pengalaman MDF memperlihatkan bahwa memilih proyek untuk dilaksanakan dalam jangka pendek mungkin lebih tepat, mengingat adanya keterbatasan waktu bagi sebagian besar program rekonstruksi. Pembelajaran penting dari keberhasilan MDF adalah pentingnya memiliki strategi pengakhiran proyek yang jelas dan dimasukkan ke dalam rancangan proyek. Pemerintah dan Bank Dunia juga memanfaatkan proses persetujuan internal yang dirampingkan dan khusus untuk keadaan darurat, yang menghasilkan pelaksanaan lebih cepat. Mempercepat penetapan keputusan dan pencairan anggaran oleh Pemerintah sangat meningkatkan efisiensi. Dan pengawasan yang ketat dan bantuan pelaksanaan oleh lembaga mitra menghasilkan investasi berkualitas tinggi dan berkelanjutan.

• Beberapa Pertimbangan Lintas Sektoral

Lingkup bantuan MDF dicantumkan pada Kebijakan Bantuan untuk Pemulihan (RAP), yang menetapkan bahwa MDF membantu pembiayaan yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang baik, keikutsertaan pemangku kepentingan, dan koordinasi dengan pihak lain. RAP menetapkan bahwa perlu diperhatikan persoalan lintas sektoral seperti kesetaraan jender, kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas agar tercipta tata pemerintahan yang baik guna meningkatkan kualitas proses pemulihan.

Bagi MDF, unsur penting lintas sektoral yang relevan adalah peningkatan kapasitas, jender, perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana. Seluruh proyek juga dirancang agar peka terhadap konflik. Unsur-unsur tersebut perlu ada di seluruh aspek program. Tantangan dan penyelesaian perlu diprakirakan sedini mungkin agar dapat diatasi secara tuntas dan terpercaya. Penyelesaian tersebut perlu diterapkan pada keseluruhan proyek yang ada pada seluruh program. MDF mengatasi hal ini melalui kegiatan teknis dan kelembagaan, dan pendekatan khusus dan umum. Penyelesaian lintas sektoral perlu diterapkan di semua tingkat pemerintahan dan pelaksana. Secara ringkas, ini perlu dicantumkan pada Penilaian Bersama/DALA. Bahkan apabila dilakukan pengkajian secara “kasar dan cepat”, penting untuk memasukkan persoalan lintas sektoral ini ke dalam penilaian kebutuhan awal agar dijadikan dasar; dan memberi pemahaman tentang tantangan sehingga dapat dirancang strategi dan kegiatan yang sesuai.

Landasan Strategis untuk Rekonstruksi

• Kerangka Kerja Pertanggungjawaban

Meskipun penyelesaian kegiatan secara cepat tampak paling penting dalam keadaan pascakonflik atau pascabencana, kerangka kerja pertanggungjawaban yang kuat dan mantap merupakan dasar dalam mengurus program rekonstruksi dengan baik.

Pemantauan dan evaluasi sangat penting dalam mengukur dan mendokumentasikan hasil dan pembelajaran, dan memastikan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Tantangannya adalah dalam menyusun Landasan Hasil yang mampu menjaring hasil pada tingkat program dari proyek yang mengucur dan sering tidak jelas.

Laporan rutin atas hasil program merupakan kunci untuk menanamkan kepercayaan dan rasa percaya diri, serta untuk menyebarkan informasi mengenai penggunaan dana secara baik kepada masyarakat, baik di negara donor maupun negara penerima.

Strategi komunikasi mutlak untuk melakukan keterbukaan dan memenuhi harapan semua pemangku kepentingan. Hal ini mendorong keterlibatan semua pihak dan memungkinkan pemangku kepentingan ikut serta dalam persoalan yang genting.

Pengelolaan dana secara baik merupakan harga mati bagi keberhasilan setiap program rekonstruksi atau MDF. Hal ini meliputi pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik secara finansial dan operasional, serta penggunaan dana secara hemat dan terbuka.

Pembelajaran dari MDF di Aceh dan Nias

1. Memulai dengan menyusun struktur organisasi yang kuat berdasarkan KEMITRAAN:

- Membina kemitraan yang erat dengan Pemerintah yang memimpin agenda program rekonstruksi, dengan bantuan pihak lain
- Mendukung strategi rekonstruksi Pemerintah, termasuk memberi bantuan dalam menyusun kerangka/menetapkan strategi tersebut apabila dibutuhkan
- Menetapkan susunan tata kelola yang melibatkan semua pihak, yang mencerminkan, dan peka terhadap kepentingan semua mitra
- Memiliki badan pembuat keputusan yang tegas, yang menerapkan proses konsultasi dengan banyak pihak
- Memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing mitra di setiap tingkat, mendorong keikutsertaan dari beraneka ragam pemangku kepentingan
- Komunikasi strategis yang tepat waktu dan terbuka dengan pemangku kepentingan merupakan KUNCI keberhasilan program

2. Melaksanakan rekonstruksi secara BERTAHAP untuk memenuhi harapan akan manfaat dari perdamaian dan rekonstruksi

- Pelaksanaan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan yang terus berkembang: pemulihan segera perlu difokuskan pada perlunya KECEPATAN; untuk rekonstruksi, pada perlunya KUALITAS DAN RASA KEPEMILIKAN; dan untuk peralihan menuju pembangunan, pada perlunya KEBERLANJUTAN. Penting untuk menentukan hasil dari setiap tahap untuk memenuhi harapan.
- Merancang proyek yang cepat menghasilkan, dan dapat diselesaikan, dengan membangun berdasarkan proyek/program yang telah ada, memilih proyek berjangka pendek, memperkecil dibutuhkannya rancangan yang mendasar, dan merancang strategi penyelesaian
- Menerapkan perampingan proses persetujuan internal dan khusus untuk keadaan darurat
- Menggunakan cara yang mantap dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan, dengan data dasar yang lengkap pada tahap awal

3. Mengidentifikasi PERSOALAN LINTAS SEKTORAL dan menyusun landasan dan strategi sejak memulai proyek:

- Unsur lintas sektoral mencakup semua program; pikirkan hal ini sejak memulai proyek, terapkan pada semua proyek dan semua tingkat pemerintah atau pemangku kepentingan dalam rekonstruksi
- Cantumkan permasalahan lintas sektoral yang patut diperhatikan dan nilai keadaan awal pada Penilaian Bersama/DALA

Menyesuaikan Model MDF untuk Penggunaan pada Keadaan Pascakonflik atau Pascabencana Lain

Peranan strategis dan penting MDF dalam rekonstruksi menyeluruh di Aceh dan Nias diakui secara luas sebagai model yang berhasil untuk rekonstruksi pascabencana. MDF mempersingkat upaya Pemerintah dalam rekonstruksi dengan mengkordinasikan sumberdaya donor dan merupakan suara dan mitra tunggal dalam membantu agenda rekonstruksinya. Hubungan yang erat antara Pemerintah dan para mitra merupakan unsur sangat penting bagi keberhasilan MDF tersebut.

MDF merupakan model dan kerangka strategis yang dapat ditiru atau disesuaikan dengan rencana rekonstruksi pascakonflik atau pascabencana lain. Ini sudah dibuktikan lewat Java Reconstruction Fund (JRF), yang dibentuk pada tahun 2006 sebagai bentuk tanggap atas serangkaian bencana lain di Indonesia. Berdasarkan pengalaman MDF, Pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia dan donor untuk membentuk JRF, yang menyesuaikan model MDF dengan kebutuhan setempat. Pengalaman tersebut berhasil menunjukkan keluwesan model ini dalam mengatasi banyak bencana, berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan letusan Gunung Merapi pada tahun 2010.

Model dan landasan strategis MDF cukup mantap untuk disesuaikan dengan keadaan di mana tidak semua faktor penyebab keberhasilan sepenuhnya dapat dipenuhi. Perlunya kepemimpinan Pemerintah dan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mendukung agenda daerah setempat sangatlah penting, dan kemitraan ini dapat dibina jika pada awalnya lemah. Pendekatan rekonstruksi secara bertahap yang disertai dengan pemilihan proyek yang strategis merupakan cara cerdas untuk mewujudkan manfaat dari perdamaian dan rekonstruksi. Disamping itu, meningkatkan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dan instansi pemerintah akan menjamin warisan ketangguhan dan kesiapan, yang muncul dari sengketa dan bencana, akan bertahan hingga masa mendatang.

Tentang Bencana-Bencana yang Melanda

Antara 2004 dan 2010, beberapa bencana alam dahsyat melanda Indonesia:

- **26 Desember 2004:** Gempa bumi sangat dahsyat berskala 9.1 pada skala Richter melanda Aceh dan beberapa daerah di Sumatra Utara. Di Aceh, 221.000 orang meninggal atau hilang. Lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Skala kehancuran fisik dan penderitaan manusia sangatlah besar.
- **28 Maret 2005:** Gempa bumi melanda Kepulauan Nias, menewaskan sekitar 1.000 orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Menghancurkan sekitar 30 persen dari semua bangunan, bencana ini mengakibatkan kerusakan yang parah.
- **27 Mei 2006:** Gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menelan lebih dari 5.700 jiwa. Lebih dari 280.000 rumah hancur dan perekonomian setempat menderita kerugian yang besar, terutama industri rumah tangga.
- **17 Juli 2006:** Gempa bumi yang memicu tsunami mengakibatkan kerusakan di sepanjang pantai selatan Jawa Barat. Sekitar 650 orang tewas, dan lebih dari 28.000 orang terpaksa harus mengungsi.
- **26 Oktober - 11 November 2010:** Gunung Merapi, gunung berapi aktif yang terletak di antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, meletus dan merusak perumahan dan infrastruktur. Sekitar 750 orang terluka atau tewas, dan sekitar 367.000 orang harus mengungsi.

Tentang MDF

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) didirikan pada bulan April 2005, sebagai tanggapan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan dan memobilisasi dukungan donor bagi rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Desember 2004, dan gempa bumi pada Maret 2005. MDF mengumpulkan AS$655 juta yang merupakan sumbangan dari 15 donor: Uni Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Selandia Baru dan Irlandia. Bank Dunia bertindak sebagai Wali Amanat MDF. Di bawah portofolio MDF, 23 proyek yang didanai terbagi dalam enam bidang hasil: (1) Pemulihan Masyarakat, (2) Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi, (3) Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas, (4) Pelestarian Lingkungan, (5) Peningkatan Proses Pemulihan, serta (6) Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian.

Tentang JRF

Menyusul permintaan dari Pemerintah Indonesia, Java Reconstruction Fund (JRF) didirikan untuk menanggapi bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006 di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan tsunami yang melanda pantai selatan Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli 2006. Tujuh donor mendukung JRF, dengan kontribusi sebesar AS$94,1 juta. Para donor tersebut adalah: Uni Eropa, Bank Pembangunan Asia, Pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia dan Denmark. Bank Dunia bertindak sebagai Wali Amanat dari JRF. Sesuai prioritas yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, JRF mendukung pemulihan masyarakat, pemulihan mata pencaharian dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat terdampak.

Foto Sampul: Seorang anak di tengah reruntuhan sekolahnya yang dihancurkan oleh gempa bumi Jawa pada bulan Mei 2006. Foto: Tim Rekompak

Diterbitkan oleh:
Sekretariat MDF - JRF
Bank Dunia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara II, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (+6221) 5299-3000
Fax : (+6221) 5299-3111

THE WORLD BANK

Multi Donor Fund for Aceh and Nias - Bersama Membangun

JRF Java Reconstruction Fund

www.worldbank.org www.multidonorfund.org www.javareconstructionfund.org